

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa bencana menghadirkan tingkat ketidakpastian yang tinggi kapan bencana itu akan terjadi. Jika melihat pada kejadian tsunami di Samudra Hindia tepatnya di wilayah Aceh yang disebabkan oleh gempa tektonik menyebabkan korban tewas sekitar 350.000 orang. Penyebab terjadinya bencana tidak terlepas dari letak wilayah Indonesia. Secara geologi Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia-Australia.

Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan terbentuknya patahan atau sesar. Aktivitas patahan dan gunung api di wilayah Indonesia selain memberikan kesuburan tanah dan anugerah sumber daya alam yang memesona, juga memberikan sumbangsih pada pembentukan risiko. Hal ini juga dikarenakan secara geografis Indonesia terletak pada jalur *ring of fire* atau disebut dengan jalur cincin api pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis-jenis bencana geologi lain. Bukan hanya itu, iklim Indonesia yang tropis dengan curah hujan yang tinggi

menyebabkan tanah tidak stabil dan mudah terjadi pelapukan sehingga memungkinkan terjadinya longsor¹.

Gambar 1. 1

Peta Indeks Kerawanan Bencana di Indonesia



Sumber: www.bnpb.go.id, 2020

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kerawanan bencana di Indonesia berada pada tingkat rawan yang tinggi. Terlebih tingkat kerawanan yang tinggi berada pada pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi yang berada pada warna merah pada gambar tersebut. Bencana merupakan suatu kejadian alam atau non bencana alam yang tidak dapat di prediksi kapan terjadinya dan memiliki dampak timbulnya korban dan kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda.

Beragam bencana pernah terjadi di Indonesia, secara implisit jenis-jenis bencana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa jenis bencana terdiri dari bencana alam,

¹ Rini Asmara, Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal J-Click, 2017, 3(2), hlm 80

bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror².

Bahaya yang memicu bencana ini akan terus terjadi di masa depan. Bahaya mungkin saja akan terjadi dalam skala besar seperti kebakaran hutan, tanah longsor, gempa bumi dan lainnya yang nantinya akan memberikan dampak pasca bencana. Berikut data yang memaparkan mengenai dampak kerusakan yang terjadi di Indonesia akibat bencana dalam rentang waktu dari tahun 2015-2020, yaitu:

² Achmad Husein dan Aidil Onasis, "Manajemen Bencana," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm 4

Tabel 1. 1

Kerusakan di Indonesia Akibat Bencana Alam Tahun 2015-2020

| No. | Tahun | Kerusakan Akibat Bencana | | | | Total Kasus Bencana |
|-----|-------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Rumah | Fasilitas Pendidikan | Fasilitas Kesehatan | Fasilitas peribadatan | |
| 1. | 2015 | 25.532 | 309 | 33 | 159 | 1.694 |
| 2. | 2016 | 47.798 | 1.484 | 232 | 601 | 2.306 |
| 3. | 2017 | 49.731 | 1.326 | 117 | 715 | 2.866 |
| 4. | 2018 | 370.153 | 2.984 | 287 | 1.503 | 3.397 |
| 5. | 2019 | 73.723 | 1.123 | 213 | 688 | 3.814 |
| 6. | 2020 | 65.743 | 713 | 146 | 824 | 4.650 |

Sumber: Olahan Penulis dari Infografis Bencana BNPB, 2021

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dampak dari berbagai bencana yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2015 sampai 2020 sangat memprihatinkan, menimbulkan kerugian dan kerusakan di berbagai aspek seperti rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan. Berdasarkan data tersebut dilihat adanya peningkatan kerusakan akibat bencana di setiap tahunnya dengan total kejadian bencana yang terus meningkat terlihat pada tahun 2020 mencapai 4.650 kejadian bencana. Hal ini dikarenakan 20% dari luasan wilayah daratan Indonesia adalah kawasan rawan bencana banjir, 4% merupakan kawasan rawan gunung api, 49% kawasan rawan tsunami, dan 98% daratan Indonesia merupakan kawasan bencana gempa bumi (Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2016)³. Dengan peningkatan jumlah bencana alam yang cukup signifikan di enam tahun terakhir tentunya memberikan dampak kepada angka kematian, hilang, menderita, dan mengungsi. Meskipun peristiwa bahaya mungkin relatif tidak

³ Wignyo Adiyosi, "Manajemen Bencana", Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm 61

berbahaya, tetapi dapat juga berujung pada cedera fisik yang parah, tekanan emosional, hilangnya nyawa.

Salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera adalah Sumatera Barat yang merupakan daerah sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Hal ini dikarenakan wilayah ini memiliki dataran rendah di pantai barat serta dataran tinggi vulkanik di sebelah timur. Kondisi ini juga disebabkan oleh letak wilayah yang berada pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian Selatan dan lempeng Eurasia di bagian Utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gempa tektonik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan potensi bencana untuk setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat⁴:

Tabel 1. 2
Penyebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat

| No. | Lokasi | Bencana | | | | | |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|
| | | Gempa | Tsunami | Banjir | Gunung Api | Longsor | Kebakaran |
| 1 | Kota Padang | Potensi | Potensi | Potensi | - | Potensi | Potensi |
| 2 | Kota Pariaman | Potensi | Potensi | Potensi | - | Potensi | Potensi |
| 3 | Kota Bukittinggi | Potensi | - | - | Potensi | Potensi | Potensi |
| 4 | Kota Padang Panjang | Potensi | - | - | Potensi | Potensi | Potensi |
| 5 | Kota Payakumbuh | - | - | Potensi | Potensi | - | Potensi |
| 6 | Kota Sawahlunto | - | - | - | - | Potensi | Potensi |
| 7 | Kota Solok | Potensi | - | Potensi | - | - | Potensi |
| 8 | Kab. Padang Pariaman | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 9 | Kab. Agam | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |

⁴ Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat, 2011

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Kab. Pasaman Barat | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 11 | Kab. Pasaman | Potensi | - | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 12 | Kab. Limapuluh Kota | Potensi | - | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 13 | Kab. Tanah Datar | Potensi | - | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 14 | Kab. Solok | Potensi | - | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 15 | Kab. Solok Selatan | Potensi | - | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 16 | Kab. Pesisir Selatan | Potensi | Potensi | Potensi | - | Potensi | Potensi |
| 17 | Kab. Sijunjung | - | - | Potensi | - | Potensi | Potensi |
| 18 | Kab. Dharmasraya | - | - | Potensi | - | Potensi | Potensi |
| 19 | Kab. Mentawai | Potensi | Potensi | - | - | Potensi | Potensi |

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2011

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa setiap daerah di wilayah provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana lebih dari satu. Salah satunya adalah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki potensi lebih banyak ancaman bencana. Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti banjir besar, gempa, angin puting beliung, tanah longsor, tsunami, abrasi dan kebakaran, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dijuluki sebagai supermarket bencana, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman Budi Mulya bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan supermarket bencana di Provinsi Sumatera Barat dimana ada 10 jenis ancaman bencana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, dan keseluruhan dari bencana tersebut ada potensinya di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman⁵.

Selain itu Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk ke dalam zona gempa tertinggi di daerah pesisir Sumatera Barat yang dapat memicu terjadinya tsunami. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga berada di jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera) yang mengakibatkan Kabupaten Padang Pariaman rentan terhadap bencana geologi dan gerakan tanah, gempa bumi dan tanah longsor⁶. Berikut sejarah peristiwa bencana besar yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman⁷:

Tabel 1. 3
Bencana Besar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 1914-2009

| No. | Tahun | Kejadian Bencana | Keterangan |
|-----|-------|--------------------------|--|
| 1 | 1914 | Banjir Besar | Terjadi pada 7 kecamatan |
| 2 | 1926 | Gempa | 7,2 SR, Pusat di Padang Panjang |
| 3 | 1934 | Banjir Bandang | Nagari Malai V Suku |
| 4 | 1967 | Angin Puting Beliung | Kabupaten Padang Pariaman |
| 5 | 1983 | Tanah Longsor | Kabupaten Padang Pariaman |
| 6 | 1996 | Kebakaran Pasar | Pasar Sungai Limau |
| 7 | 2000 | Abrasi Pantai | 60 km bibir pantai rusak |
| 8 | 2005 | Gempa Bumi, 10 April | 5,8 SR, 500 Bangunan rusak |
| 9 | 2007 | Tanah Longsor, 8 Januari | 13 orang korban, di Kolam Jariah |
| 10 | 2007 | Banjir, 22-23 Januari | 1.506 rumah terendam, 108 Ha terendam, 108 Ha lahan pertanian rusak di 9 kecamatan |
| 11 | 2007 | Gempa Bumi, 6 Maret | 6,3 SR, ±12.000 Bangunan rusak |
| 12 | 2007 | Angin Puting Beliung | 43 bangunan rusak di 6 kecamatan |

⁵ Suci, BPBD Padang Pariaman Kembangkan Inovasi Aplikasi Kawasan Rawan Bencana Berbasis NIK, (<https://www.fajarsumbar.com/2021/03/bpbd-padang-pariaman-kembangkan-inovasi.html>), 2021, diakses pada 28 Oktober 2021 Pukul 12.03 WIB

⁶ BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Dokumen KRB 2020-2024,

⁷ Syarfina Mahya Nadila & Annisa Meutia Ratri, Partisipasi Masyarakat Dalam Adaptasi Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman. Share: Social Work Journal, 2020, 10(1), hlm 12

| | | | |
|----|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13 | 2007 | Gempa Bumi, 12-13 September | 7,3/7,7 SR, ±7.000 Bangunan rusak |
| 14 | 2009 | Gempa Bumi, 30 September | 7,9 SR ±87.929 Bangunan rusak |

Sumber: (Mukhni, 2012)

Berdasarkan pada data di atas rentannya bencana alam maupun non-alam yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman agar selalu waspada dan cepat tanggap terhadap kejadian agar risiko bencana dapat di minimalisir. Untuk meminimalisir bencana yang terjadi maka perlu membangun ketahanan masyarakat dalam kebencanaan. Berikut adalah indeks potensi pengkajian risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 1. 4
Potensi Bahaya di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

| No. | Jenis Bencana | Bahaya | |
|-----|------------------------------|------------|--------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Banjir Bandang | 11.481,48 | Tinggi |
| 2 | Banjir | 33.733,40 | Tinggi |
| 3 | Cuaca Ekstrim | 66.513,43 | Sedang |
| 4 | Gelombang Ekstrim Dan Abrasi | 828,81 | Tinggi |
| 5 | Gempa bumi | 133.224,00 | Tinggi |
| 6 | Kebakaran Hutan Dan Lahan | 73.427,45 | Sedang |
| 7 | Kekeringan | 133.224,00 | Sedang |
| 8 | Letusan Gunung api Tandikek | 4.321,05 | Sedang |
| 9 | Tanah Longsor | 43.851,97 | Tinggi |
| 10 | Tsunami | 6.199,08 | Tinggi |

Sumber: Dokumen KRB BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2020

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa kelas bahaya seluruh potensi bencana di Kabupaten Padang Pariaman bervariasi yaitu ada yang berada pada kelas tinggi dan sedang. Tsunami adalah salah satu bencana yang

berada pada potensi kelas tinggi. Berdasarkan analisis dan prediksi para ahli dan peneliti bahwa wilayah sepanjang pantai barat pulau Sumatera terancam akan bencana tsunami, mengingat pantai Barat Sumatera merupakan jalur penujaman (*Subduction Zone*) sebagai penyebab terjadinya gempa. Jika terjadi dislokasi atau pematahan di bawah samudera, maka akan mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami tersebut⁸. Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dalam menghadapi bencana yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5
Hasil Kajian Ketahanan Kabupaten Padang Pariaman

| No | Prioritas | Indeks dan Prioritas | Indeks Kapasitas Daerah | Tingkat Kapasitas Daerah |
|----|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan | 0,66 | 0,40 | RENDAH |
| 2 | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu | 0,77 | | |
| 3 | Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik | 0,57 | | |
| 4 | Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana | 0,48 | | |
| 5 | Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 0,47 | | |
| 6 | Perkutan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana | 0,21 | | |
| 7 | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana | 0,41 | | |

Sumber: Dokumen KRB BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2020-2024

⁸ Andi Syukri, Studi Jalur Evakuasi Tsunami Horizontal di Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Rekayasa Sipil, 2016, Vol. 8, No. 2, hlm. 7

Berdasarkan tabel 1.5 mengenai hasil kajian ketahanan terlihat bahwa kapasitas daerah Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan berada pada tingkat kapasitas rendah dengan indeks kapasitas 0,40. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Dalam mewujudkan ketahanan dan ketangguhan daerah terhadap bencana, maka hal ini perlu diwujudkan mulai ditingkat masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti temukan terdapat enam kecamatan yang rentan terancam akan bencana tsunami di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

Tabel 1. 6
Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

| No. | Kecamatan | Bahaya | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Batang Anai | 1.929,60 | Tinggi |
| 2 | Batang Gasan | 859,23 | Tinggi |
| 3 | Nan Sabaris | 350,08 | Tinggi |
| 4 | Sungai Limau | 1.351,71 | Tinggi |
| 5 | Ulakan Tapakis | 1.522,70 | Tinggi |
| 6 | V Koto Kampung Dalam | 185,76 | Tinggi |
| Kabupaten Padang Pariaman | | 6.199,08 | Tinggi |

Sumber: Dokumen KRB BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2020-2024

Berdasarkan parameter bahaya tsunami yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel 1.6 bahwa Kecamatan Batang Anai adalah daerah yang memiliki luas wilayah yang paling besar terdampak bencana tsunami seluas 1.929,60 Ha dengan potensi kelas tinggi dan dengan melihat potensi penduduk yang akan terpapar tsunami berjumlah 44.938 jiwa (hasil analisis 2019 oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman)⁹. Dengan melihat keadaan masyarakat dan besarnya dampak kerusakan yang

⁹ Dokumen KRB BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2020-2024

disebabkan oleh bencana alam, maka perlu penanganan serius untuk menghadapi ancaman bencana tsunami. Maka dari itu penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan dititikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta penanganan darurat bencana yang dipayungi oleh payung hukum yang jelas¹⁰.

Untuk menghindari dan mengurangi dampak risiko bencana maka perlunya pengelolaan bencana yang meliputi dari pencegahan/mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap setelah bencana. Agar dampak bencana dapat di minimalisir maka pencegahan dapat dilakukan pada tahap pra bencana, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana memfokuskan pada tindakan jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana yang dapat bersifat struktural maupun non struktural. Tindakan mitigasi non struktural merupakan mitigasi dalam bentuk legislasi dan perencanaan wilayah, sedangkan tindakan mitigasi struktural merupakan pelengkap dan penunjang dari tindakan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural meliputi aktivitas fisik seperti pembangunan *shelter*, jalur evakuasi dan rekayasa bangunan yang dapat menjadi upaya pengurangan

¹⁰ Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat

risiko bencana¹¹. Oleh karena itu pentingnya sebuah mitigasi bencana untuk mengantisipasi dan meminimalisir kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Untuk menghadapi ancaman bencana tersebut maka pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia di tanggulangi oleh sebuah badan yaitu BNPB yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memiliki tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi secara adil dan setara. Membangun kesiapan dalam menghadapi bencana merupakan salah satu hal penting dalam upaya penanggulangan bencana. Paradigma penanggulangan bencana telah mengalami pergeseran dari *fatalistic responsive* yang berorientasi pada respon kedaruratan akibat bencana menuju kepada *proactive preparedness* yaitu penanggulangan bencana yang dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan hingga tahap pemulihan sosial¹². Hal ini dikarenakan bencana adalah suatu peristiwa alami atau buatan manusia secara tiba-tiba atau progresif yang berdampak sangat parah sehingga komunitas yang terkena dampak harus merespon dengan mengambil tindakan luar biasa¹³.

¹¹ W. Nick Carter, *Disaster Management Disaster Manager's Handbook*, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2008, hlm 203

¹² Khoirul Anam et al., "Kesiapan Institusi Lokal dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6.1 (2018), 15.

¹³ W. Nick Carter, *op. cit.* hlm xix

Salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan penanggulangan bencana yaitu dengan mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Strategi yang digunakan adalah melalui pengembangan desa-desa yang tangguh terhadap bencana, yaitu program yaitu Desa Tangguh Bencana atau Destana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012.

Dijelaskan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa Tangguh Bencana ini juga menjadi program yang telah diamanatkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026, sebagaimana yang diungkapkan oleh Budi Mulya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman berikut ini:

“Program Desa Tangguh Bencana ini cukup bagus karena memang sesuai dengan RPJMD Bupati, memang kita ditempatkan oleh Bupati untuk menciptakan ketangguhan secara menyeluruh di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintahannya, jadi kita harus melaksanakan pelayanan dasar menciptakan kesiapsiagaan sebelum ada kejadian yang dinamakan dengan masa pra bencana. Jadi semuanya sinkron antara program dari pemerintahan pusat dan didukung dengan salah satu IKU Padang Pariaman” (Wawancara Budi Mulya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pada 15 Maret 2022)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mengembangkan program Desa Tangguh Bencana dengan menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman. Program Desa Tangguh Bencana menjadi sasaran kelima yaitu penguatan layanan kebencanaan dengan membentuk Nagari Tangguh Bencana yang merupakan tujuan dari misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kualitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat¹⁴.

Desa Tangguh Bencana dapat dikatakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pengembangan reguler¹⁵. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Bentuk kapasitas Desa Tangguh Bencana terwujud melalui adanya perencanaan pembangunan yang mengandung upaya pencegahan dari potensi bencana, kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana¹⁶.

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat agar memiliki kemampuan

¹⁴ Dokumen Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2021-2026

¹⁵ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012

¹⁶ Najib, Ainun, dan Hayatul Khairul Rahmat. 2021. "Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana pembangunan yang mengandung upaya pencegahan dari potensi bencana ,," 5: 14-23.

untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Triatmadja menjelaskan bahwa sebagian besar kematian yang terjadi di Indonesia akibat tsunami dikarenakan tidak siapnya masyarakat terhadap kedatangan tsunami¹⁷. Melihat dari beberapa penelitian yang terkait dengan program Desa Tangguh Bencana yaitu penelitian oleh Dwi Ratna Sari dan Tri Yuniningsih (2019) tentang Manajemen Risiko Bencana dalam Desa Tangguh Bencana di BPBD Kabupaten Purworejo, penelitian ini menekankan bahwa pentingnya perencanaan penanggulangan bencana dalam program Desa Tangguh Bencana dengan melakukan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana melalui sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat serta pengkajian pembuatan peta risiko dan peta jalur evakuasi¹⁸.

Sementara itu menurut Supriyati, dkk¹⁹ mengungkapkan bahwa pendekatan informal adalah kunci sukses dalam mengkomunikasikan informasi tentang bahaya, risiko dan kerentanan kepada masyarakat. Bertolak dari beberapa penelitian tersebut maka penelitian ini berfokus kepada mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Padang Pariaman melalui program Desa Tangguh Bencana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam program

¹⁷ Khairunnisa Adri, Hayatul Khairul Rahmat, dkk, Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang, Nusantara:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2020, 7 (2), hlm 362

¹⁸ Dwi Ratna Sari & Tri Yuniningsih, Manajemen Risiko Bencana dalam Desa Tangguh Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 9, No. 1, 2019.

¹⁹ Supriyati Andreastuti, Agus Budianto, & Eko Teguh Paripurno, Integrating Social and Physical Perspectives of Mitigation Policy and Practice in Indonesia, In Observing the Valcano World (307-320), 2017

Destana masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayahnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Keberadaan dari Desa Tangguh Bencana tidak lepas dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Peran BPBD dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana memiliki tugas untuk mengkoordinasikan semua sektor di daerah rawan bencana. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 yang menyatakan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai unsur pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD juga sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana. Selain itu Komponen-komponen yang dimiliki oleh Destana yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Legislasi yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.
2. Perencanaan yaitu penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan).

²⁰ Friska, Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang, 2020

3. Kelembagaan yaitu pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW/RT, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. Pendanaan yaitu rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/Kota, APB Desa/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. Pengembangan kapasitas yaitu pelatihan, Pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Saat ini terdapat 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebagai pelaksana program Destana, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman

| Kecamatan | Nagari Tangguh Bencana | Tahun |
|------------------|---|--------------|
| Batang Anai | Nagari Katapiang | 2015 |
| Ulakan Tapakis | Nagari Ulakan | 2020 |
| | Nagari Tapakis | 2020 |
| | Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan | 2020 |
| | Seulayat Ulakan | 2021 |
| Nan Sabaris | Nagari Sunua Barat | 2020 |
| | Nagari Kurai Taji | 2020 |
| 2X11 Kayu Tanam | Nagari Anduriang | 2019 |
| V Koto Kp Dalam | Nagari Campago | 2019 |
| Sungai Limau | Nagari Kuranji Hilir | 2015 |
| | Nagari Pilubang | 2020 |
| | Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir | 2020 |
| | Nagari Guguak Kuranji Hilir | 2020 |
| Batang Gasan | Nagari Malai V Suku | 2020 |
| | Nagari Gasan Gadang | 2020 |

Sumber: BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Pada tabel 1.7 dapat diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 15 Desa Tangguh Bencana yang tersebar di 7 kecamatan yang pertama kali dimulai pada tahun 2015, empat nagari dengan penumbuhan di anggarkan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat. Rangkaian proses kegiatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman dimulai dengan pembekalan yang diberikan okeh fasilitator daerah. Setelah pembekalan maka akan dilaksanakan sosialisasi ke Wali Nagari. Nagari memiliki andil yang besar dalam program Destana, salah satunya adalah

akses data. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman berikut ini²¹:

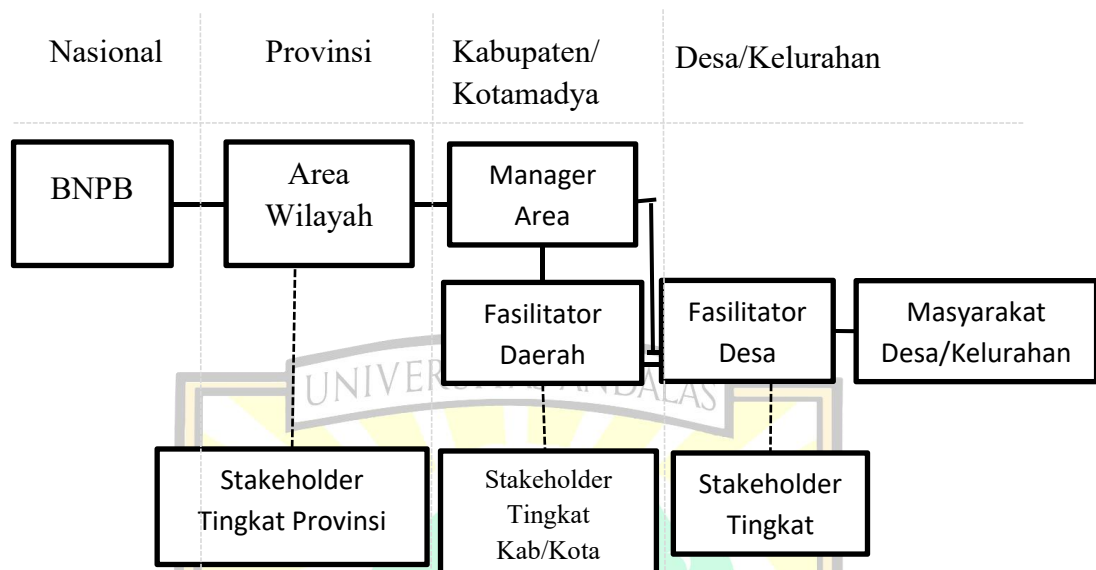
“Dalam melaksanakan Destana ada fasilitator dari provinsi, kabupaten, dan nagari dan fasilitator ini disebut dengan Manajer Area (MA). Tahapan-tahapan ini sudah ditentukan mekanismenya yang nanti tim ini akan turun ke lapangan untuk mengambil data mengenai tsunami terkait dengan penilaian ketangguhan desa yang dimulai dengan perekrutan sampai ke seminar hasil.” (Wawancara dengan Wirman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pada 15 Maret 2021).

Dari wawancara di atas diungkapkan bahwa dalam program Desa Tangguh Bencana memiliki fasilitator dari berbagai tingkatan yaitu provinsi, kabupaten dan tingkat nagari. Harapannya sesudah pelaksanaan pembentukan Destana itu dilakukan, bukan hanya sekadar penilaian ketangguhan desa saja tetapi ada tindak lanjut sehingga nanti nagari tersebut dapat mandiri dalam menghadapi bencana, artinya risiko dan dampak bencana di nagari yang rentan bencana dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Hal ini bermakna agar tidak adanya ketergantungan dari masyarakat ke pemerintah sepenuhnya, dan dapat mandiri dan beradaptasi jika bencana alam terjadi. Berikut bentuk struktur organisasi terkait fasilitator Desa Tangguh Bencana:

²¹ Wawancara bersama Wirman, SE, MPA, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 15 Maret 2021.

Gambar 1. 2

Struktur Organisasi Fasilitator Desa Tangguh Bencana



Sumber: Buku Pedoman Fasilitator Desa Tangguh Bencana, 2020

Dari gambar 1.2 di atas dapat di lihat aktor yang terlibat dalam penilaian ketangguhan desa/nagari pada program Desa Tangguh Bencana. Dalam pelaksanaan penilaian ketangguhan desa dibutuhkan fasilitator-fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan desa/nagari dalam melakukan penilaian ketangguhan desa/nagari secara mandiri. Dalam program penilaian ketangguhan desa/nagari yang dilakukan pada tahun 2020 oleh BNPB terdapat fasilitator desa/nagari, fasilitator nagari, manajer area daerah, manajer area wilayah. Fasilitator memiliki peran sebagai memperlancar atau bertugas mempermudah proses mempelajari-memahami persoalan dan kemudian memutuskan tindakan.

Fasilitator desa/nagari merupakan orang dari desa/nagari lokasi pelaksanaan penilaian ketangguhan desa/nagari. Hal ini dimaksudkan agar

lebih memahami dengan kondisi desa/nagari setempat yang tentunya nanti juga menjaga agar proses membangun ketangguhan tetap berlangsung meskipun program dari BNPB telah selesai. Dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana dijelaskan bahwa kegiatan untuk mengembangkan Desa Tangguh Bencana yaitu:

- a. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan
- b. Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana dan Perencanaan Kontijensi Desa atau Kelurahan.
- c. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan
- d. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana
- e. Pemanduan Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi
- f. Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Desa/Kelurahan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di Tingkat Desa Atau Kelurahan

Jika berdasarkan dengan mitigasi bencana menurut teori W.N Carter tentang Mitigasi, maka bentuk kegiatan yang dilakukan pada program Desa Tangguh Bencana juga termasuk dalam langkah-langkah mitigasi bencana secara struktural dan non struktural. Dengan tujuan untuk melakukan pengurangan dampak risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Carter membagi mitigasi non struktural dalam beberapa kegiatan, salah satunya adalah dengan

pembentukan kelembagaan sebagai membangun institusi atau kelompok-kelompok organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana. Sehingga akan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi bencana. Hal ini terbukti dengan dikukuhkannya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor 367/KEP/BPP/2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2022²². Dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan bukti dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.

Wadah dalam penanggulangan dalam program Desa Tangguh Bencana ini adalah FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bertujuan adanya pengurangan risiko bencana dan Tangguh terhadap bencana. FPRB bertujuan untuk Di tingkat Nagari, FPRB ini merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu dalam hal pengurangan risiko bencana salah satunya pada tahap kesiapsiagaan bencana. Struktur dari FPRB merupakan masyarakat nagari yang merepresentasikan semua unsur perwakilan masyarakat.

Selain FPRB, kemudian dapat dibentuk Tim/Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang akan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Namun

²² Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 367/KEP/BPP/2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2022

dalam kategori pra bencana, kelompok ini dapat menjadi pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Dalam kelompok siaga bencana, terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya. Tidak hanya dalam bentuk kontribusi tenaga dan material tetapi juga input terhadap proses perencanaan maupun pengambilan keputusan²³.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, diungkapkan bahwa sebagai berikut ini:

“Untuk pengembangan program Desa Tangguh Bencana di tahun 2015 dan 2019 itu dianggarkan oleh BPBD Provinsi. Dan untuk tahun 2021 ini sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), target dari Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya dibentuk 2 Desa Tangguh Bencana di Nagari. Dan pada tahun 2020 BPBD Kab. Padang Pariaman bekerja sama dengan BNPB melalui program ekspedisi Destana, dibentuk 10 nagari tangguh bencana di sepanjang pesisir pantai yang prosesnya mengacu pada BNPB.” (Wawancara dengan Wirman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pada 15 Maret 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2021 Desa Tangguh Bencana telah menjadi Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Padang Pariaman. Awal Destana dibentuk pada tahun 2015 kemudian di tiga tahun kemudian tidak tampak adanya pembentukan program Destana dan langsung melompat pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 langsung dibentuk 10 Desa Tangguh Bencana sekaligus yang diinstruksikan oleh BNPB Pusat dengan dikeluarkannya surat Nomor

²³ Syarfina Mahya Nadila & Annisa Meutia Ratri. Adaptasi Bencana di Kabupaten Padang Pariaman: Studi tentang Resiliensi Wilayah Pesisir, Share: Social Work Journal, Vol. 10, No. 1, hlm 16

B.97/BNPB II/PK.02.03/07/2020 Perihal rekrutmen fasilitator desa/kelurahan untuk ekspedisi desa/tangguh bencana – tsunami.

Dikeluarkannya surat tersebut sebagai bentuk tindak lanjut akan kejadian bencana tsunami di dua daerah di Indonesia yaitu tsunami Banten dan Sulawesi Tengah yang memakan korban cukup banyak. Sehingga diperlukannya upaya penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui program ekspedisi Destana, BNPB memusatkan pada daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan potensi ancaman tsunami. Dan Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu target untuk peningkatan kapasitas ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.

Kemudian pada tahun 2021 telah dibentuk satu Desa Tangguh Bencana di Nagari Seulayat Ulakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026. Dipilihnya Nagari Seulayat ditahun 2021 oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan program Desa Tangguh Bencana di ungkapkan oleh Wirman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

“Tahun 2021 dibentuk di Nagari Seulayat karna memang nagari tersebut memiliki ancaman potensi bencana yang cukup rentan apalagi bencana tsunami sebab nagari tersebut tepat berada di kawasan bibir pantai. Jadi kami memprioritaskan terlebih dahulu nagari-nagari yang berada di sepanjang kawasan pesisir pantai” (Wawancara dengan Wirman selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pada 6 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2021 pembentukan Desa Tangguh Bencana di Seulayut Ulakan merupakan pembentukan Destana pertama dengan menggunakan pagu indikatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas peneliti akan berfokus pada pengembangan Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang berada di Nagari Katapiang, Nagari Sunua Barat dan Nagari Seulayut Ulakan. Hal ini dikarenakan proses pembentukan Desa Tangguh Bencana terlaksana di nagari tersebut dengan latar belakang anggaran yang berbeda yaitu Nagari Katapiang anggaran pembentukan dari APBD Sumatera Barat, Nagari Sunua Barat anggaran pembentukan dari APBN dan Nagari Seulayut anggaran pembentukan berasal dari APBD Padang Pariaman²⁴. Kemudian hal ini juga didukung dengan potensi gelombang pasang atau tsunami bervariasi dari utara ke selatan, karena daerah selatan lebih landai. Sehingga dampak tsunami lebih besar pada daerah kecamatan Ulakan Tapakis dan kecamatan Batang Anai²⁵.

Dengan pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Nagari Katapiang sejak tahun 2015 yang sudah berjalan enam tahun tentunya harus sudah mengalami perkembangan dalam program Desa Tangguh Bencana, namun berdasarkan observasi awal Nagari Katapiang masih dalam kategori ketangguhan level pratama. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sejak pembentukan Desa Tangguh Bencana di Nagari

²⁴ Wirman, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2021

²⁵ Op.cit, Andi Syukri, hlm 7

Katapiang, seperti yang disampaikan oleh KSB Nagari Katapiang, sebagai berikut:

“KSB di Nagari ini sudah sekitar satu tahun belakangan vakum, karena memang regenerasi itu yang susah dicari. Apalagi KSB ini kan memiliki peran sebagai jembatan dalam program Desa Tangguh Bencana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mitigasi, jadi kami itu perpanjangan tangan dari BPBD. Namun sayangnya kegiatan disini vakum karna banyak kendala, seperti anggaran. (wawancara dengan Syamsurizal selaku Ketua KSB Nagari Katapiang, Pada 21 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana pasca pembentukan di tahun 2015 ditemui beberapa masalah seperti sumber daya manusia dan anggaran dalam melaksanakan program Desa Tangguh Bencana sehingga kegiatan di Nagari Katapiang dapat dikatakan vakum untuk sementara waktu.

Dari observasi awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman, kelima belas nagari tersebut masih kategori Desa Tangguh Bencana level Pratama, hal ini relevan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman berikut ini:

“Dari 15 Nagari yang telah terbentuk dan termasuk dalam program Desa Tangguh Bencana, rata-rata ketangguhan nagari masih berada pada level satu, yaitu level pratama. Artinya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, seperti masih kurangnya sosialisasi di tingkat Nagari, dan jalur evakuasi yang masih belum ditetapkan secara resmi oleh tiap nagari. Apalagi pada daerah yang rawan bencana tsunami perlunya ditetapkan jalur evakuasi dan peta evakuasi yang resmi, termasuk Nagari Katapiang yang dibentuk sejak tahun 2015 itu masih dalam level pratama.” (Wawancara dengan Wirman, SE, MPA, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pada 22 Februari 2022).

Tentunya BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai fasilitator terhadap program Desa Tangguh Bencana ini perlu melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program Desa Tangguh Bencana di Nagari telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan indikator-indikator yang ada. Dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana ini juga harus disinergikan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah lainnya. Lembaga secara bersama-sama nantinya akan menyusun program guna penguatan kapasitas komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Sumber Daya Manusia juga menjadi hambatan BPBD dalam memberikan pendampingan, mengingat terdapat 103 nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu saat ini BPBD fokus pada penumbuhan Desa Tangguh Bencana di nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian untuk Nagari Sunua Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil di antara nagari lainnya, namun juga merupakan daerah yang memiliki risiko bencana tsunami yang cukup tinggi. Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Nagari ini dilakukan pada akhir tahun 2020 yang di fasilitatori oleh BPBD Padang Pariaman bersama BNPB Pusat.

Gambar 1.3**Ekspedisi Desa Tangguh Bencana di Nagari Sunua Barat**

Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Dapat dilihat pada gambar 1.3 bahwa BPBD Padang Pariaman telah melaksanakan Ekspedisi Desa/Nagari Tangguh Bencana Tsunami di Nagari Sunua Barat. Ekspedisi ini dilakukan untuk membentuk Desa Tangguh Bencana di Nagari Sunua Barat, berdasarkan data yang ditemukan sejak ekspedisi ini dibentuk hingga saat ini dalam upaya mitigasi non struktural yaitu dalam tahap pembentukan kelompok KSB (Kelompok Siaga Bencana) telah dilaksanakan, namun dalam tahap pembentukan kerangka hukum berupa peraturan di tingkat nagari terkait penanggulangan bencana masih belum ada dan kegiatan tidak terlaksana. Seperti yang diungkapkan oleh Fasilitator Desa Tangguh Bencana Nagari Sunua Barat sebagai berikut:

“Terakhir kegiatan program Destana itu dilakukan disini hanya sosialisasi dan pengambilan data di akhir tahun 2020 oleh BNPB, untuk FPRB memang sudah terbentuk tapi hanya sekadar terbentuk dan sekarang terbengkalai saja, karena anggaran itu tidak ada jadi tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan.” (Wawancara dengan Khairul Anas, selaku Fasilitator Desa Tangguh Bencana di Nagari Sunua Barat, pada 29 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Fasilitator Desa di Nagari Sunua Barat dapat diketahui bahwa program Desa Tangguh Bencana tidak terlaksana dikarenakan terkendala anggaran. Sehingga kegiatan tidak berjalan dan ketangguhan nagari masih dalam kategori pratama. Kendala seperti ini menghambat jalannya program Desa Tangguh Bencana di Nagari Sunua Barat. Untuk melihat ketangguhan desa/nagari terdapat penilaian ketangguhan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Dalam penilaian ketangguhan ini terdapat 5 komponen dan 26 indikator dalam penilaian ketahanan desa/nagari dengan sebagai berikut:

1. Komponen 1 : Kualitas dan Akses Layanan Dasar; terdiri dari 9 indikator
2. Komponen 2 : Pengelolaan Risiko Bencana; terdiri dari 7 indikator
3. Komponen 3 : Pengelolaan Risiko Bencana; terdiri dari 2 indikator
4. Komponen 4 : Kesiapsiagaan Darurat; terdiri dari 6 indikator
5. Komponen 5 : Kesiapsiagaan Pemulihan; terdiri dari 2 indikator

Penilaian ketangguhan desa/nagari dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada *form* penilaian atau kuesioner. Pertanyaan tersebut di ajukan untuk mengetahui kondisi tiap-tiap indikator. Gabungan nilai berdasarkan bobot tiap-tiap komponen memberikan hasil level Ketangguhan Desa/Nagari dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60)
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor 36-50)
- c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35)

Berdasarkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman khususnya mengenai bahaya bencana tsunami, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mitigasi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Diambilnya lokus Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman dengan informan triangulasi Nagari Katapiang dikarenakan mengingat nagari tersebut adalah nagari penumbuhan Destana pertama sejak tahun 2015 dan memiliki daerah yang luas akan rentannya dampak tsunami di Kecamatan Batang Anai dan penganggarannya berasal dari BPBD Provinsi.

Selanjutnya Nagari Sunua Barat yang merupakan daerah yang memiliki luas paling kecil dan Desa Tangguh Bencana yang terbentuk pada tahun akhir tahun 2020 yang anggaran pembentukannya berasal dari BNPB. Kemudian Nagari Seulayat Ulakan yang dibentuk pada tahun 2021 yang sumber anggarannya berasal dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat tingkat kapasitas daerah Kabupaten Padang Pariaman yang masih rendah akan ketahanan dan ketangguhan terhadap potensi bencana maka dari itu dibutuhkan sebuah mitigasi bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang sebagai berikut: “Bagaimana Mitigasi Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Mitigasi Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana Oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian yang akan peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang mitigasi bencana. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, manfaat yang dirasakan oleh peneliti yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan terutama ilmu manajemen publik.
2. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap instansi terkait mitigasi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman
3. Bagi pihak lain, sebagai penambahan wawasan tentang mitigasi bencana pada program Desa Tangguh Bencana.

